



PT. Tempo Utama Finance

LAPORAN KEBERLANJUTAN

Tahun 2023

DAFTAR ISI

1.	Strategi keberlanjutan	1
2.	Ikhtisar aspek keberlanjutan 2021-2023	
2.1.	Aspek ekonomi	3
2.2.	Aspek sosial	3
2.3.	Aspek lingkungan hidup	3
3.	Profil Perusahaan	
3.1.	Visi misi berkelanjutan	4
3.2.	Sekilas Perusahaan	5
3.3.	Skala organisasi	5
3.4.	Kegiatan usaha dan produk/jasa pembiayaan	5
3.5.	Keanggotaan dalam Asosiasi & Badan	6
4.	Penjelasan Direksi	
4.1.	Kebijakan untuk merespon tantangan pemenuhan strategi keberkelanjutan	7
4.2.	Penerapan keuangan berkelanjutan	8
4.3.	Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan	10
5.	Tata kelola berkelanjutan	
5.1.	Tugas dan tanggung jawab penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan	11
5.2.	Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan	12
5.3.	Penjelasan manajemen risiko dalam penerapan keuangan berkelanjutan	12
5.4.	Pendekatan pemangku kepentingan	15
5.5.	Permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan	16
6.	Kinerja berkelanjutan	
6.1.	Membangun budaya berkelanjutan	17
6.2.	Kinerja ekonomi	17
6.3.	Kinerja sosial	18
6.4.	Kinerja lingkungan hidup	20
7.	Referensi Peraturan OJK	22

1. Strategi keberlanjutan

Perubahan iklim telah menjadi isu global dan dampaknya juga telah dirasakan oleh masyarakat global. Pandemi *Covid-19* telah berakhir, namun komitmen untuk melakukan mitigasi atas dampak perubahan iklim tersebut masih terus berjalan.

Undang Undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change* telah menyatakan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (“GRK”). Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah melakukan berbagai kebijakan untuk mendukung sektor jasa keuangan menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Setelah menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan tahap I (2015 – 2019), OJK melanjutkan inisiatif dengan mengeluarkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan tahap II (2021 – 2025) untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola di Indonesia.

PT. Tempo Utama Finance (“Perusahaan”) merupakan bagian dari sektor jasa keuangan dan menjalankan kegiatan usaha pembiayaan di wilayah Indonesia mempunyai komitmen melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup secara seimbang serta menegakkan tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen ini merupakan kontribusi Perusahaan dalam penerapan keuangan berkelanjutan.

Perusahaan telah menetapkan visi untuk menjadi perusahaan pembiayaan yang profesional, inovatif, bertanggung jawab dan amanah dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dan untuk mencapai visi tersebut, Perusahaan juga telah menetapkan misi yaitu menyediakan dan menawarkan produk dan jasa pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat dan memberikan kontribusi menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Peraturan OJK (“POJK”) No. 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik merupakan acuan Perusahaan dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Oleh karena itu, disusun dan ditetapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”) tahun 2020 – 2024 yang menjadi panduan bagi seluruh pihak internal dalam melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan. RAKB 2020 - 2024 tersebut mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 dan Lampiran I POJK

No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan tersebut, Perusahaan bukan hanya fokus melaksanakan strategi pencapaian kinerja ekonomi namun juga mempertimbangkan pencapaian kinerja sosial dan lingkungan hidup dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Strategi yang berimbang ini diyakini akan memberikan dampak dan hasil yang positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 pasal 7, Perusahaan telah menyusun dan menjalankan prioritas penerapan keuangan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam RAKB tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- (1) Prioritas pertama: pengembangan kapasitas internal Perusahaan yang dilaksanakan pada periode tahun 2020 – 2021;
- (2) Prioritas kedua: penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola dan/atau *Standard Operating Procedure* (“SOP”) yang selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan dilaksanakan pada periode tahun 2022 – 2023;
- (3) Prioritas ketiga: pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk implementasi produk/jasa pembiayaan yang selaras keuangan berkelanjutan akan dilaksanakan pada periode tahun 2024.

2. Ikhtisar aspek keberlanjutan tahun 2021 – 2023

2.1. Kinerja aspek ekonomi

Deskripsi (Dalam Rp. Juta)	2023	2022	2021
1 Total aset	111.408	109.341	108.539
2 Piutang pembiayaan	49.053	56.576	56.907
3 Total pendapatan	7.268	5.573	5.363
4 Laba bersih	2.154	1.046	957
5 Data produk/jasa pembiayaan ramah lingkungan	N/A	N/A	N/A
6 Data pelibatan pihak lokal dalam proses bisnis keuangan berkelanjutan	N/A	N/A	N/A

2.2. Kinerja aspek sosial

Deskripsi	2023	2022	2021
1 Komposisi SDM berdasarkan pendidikan (%)	100,00	100,00	100,00
a. Sekolah Menengah	10,00	11,11	12,50
b. Diploma 3 (D-3)	20,00	33,33	25,00
c. Sarjana Strata 1 (S-1)	70,00	55,56	62,50
d. Pasca Sarjana (S-2)	-	-	-
2 Total pelatihan & webinar/seminar (kali)	17	12	9
a. Pelatihan/Training	3	-	1
b. Webinar/Seminar	14	12	8
3 Rasio SDM terhadap jumlah pelatihan/training dan Webinar/Seminar (kali)	1,59	1,11	1,66
4 Program Literasi Keuangan			
a. Jumlah kegiatan literasi keuangan (kali)	1	1	1
b. Metode kegiatan literasi keuangan	Offline	Online	Online
c. Jumlah peserta literasi keuangan (orang)	35	40	35

2.3. Kinerja aspek lingkungan hidup

Deskripsi	2023	2022	2021
1 Total energi listrik (KwH)	6.764	8.151	7.280
2 Total pemakaian kertas (lembar)	63.404	56.892	53.179
3 Estimasi emisi GRK yang dihasilkan (KgCO2)	4.904	5.910	5.278

3. Profil Perusahaan

Perusahaan (d/h. PT Artha Rahardja Sakti Leasing) didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1983 berdasarkan Akta Nomor 199 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-2004.HT. 01.01.TH.84 tanggal 30 Maret 1984 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 tanggal 12 Juni 1984, Tambahan Nomor 578. Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 31 Juli 2012 dihadapan Notaris Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto Sarjana Hukum, Notaris bertempat di Jakarta, dilakukan seluruh perubahan anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan anggaran dasar dimaksud telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-45434.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan telah mengalami perubahan beberapa kali dengan akta terakhir lainnya yang termuat dalam Akta No. 19 tanggal 28 Juli 2020 yang telah dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Juli 2020, Nomor: AHU-AH.01.03-0316653.

3.1. Visi Misi Berkelanjutan

Dalam menjalankan komitmen keuangan berkelanjutan, Perusahaan menyusun dan menetapkan visi misi berkelanjutan sebagai berikut:

Visi:

Menjadi Perusahaan Pembiayaan professional, inovatif, bertanggung jawab dan amanah dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Misi:

Menyediakan dan menawarkan produk dan jasa pembiayaan yang terjangkau masyarakat dan memberikan kontribusi menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

3.2. Sekilas Perusahaan

Berikut ini informasi mengenai Perusahaan:

Nama Perusahaan	PT. Tempo Utama Finance
Alamat Kantor Pusat	Tempo Scan Tower lantai 5 Jln. HR Rasuna Said Kav.3-4 Jakarta 12950
No. Telepon	(021)29667879
E-mail	tufjkt@thetempogroup.com
Website	http://www.tempoutamafinance.com

3.3. Skala Organisasi

Berikut ini informasi mengenai skala organisasi:

Total Aset (Rp. Juta)	111.408	
Jumlah Kantor	1 (Satu) Kantor Pusat merangkap kantor operasional di Jakarta Perusahaan belum mempunyai Kantor Cabang maupun Kantor Selain Kantor Cabang di luar kota Jakarta	
Area Operasional	DKI Jakarta, Jawa Barat & Jawa Timur	
Komposisi karyawan menurut pendidikan	S3	-
	S2	-
	S1	70,00%
	D3	20,00%
	SMA	20,00%
Komposisi karyawan menurut jabatan	Direksi	20,00%
	Manager	20,00%
	Supervisor	20,00%
	Non staff	40,00%
Komposisi karyawan menurut usia	> 60 tahun	10,00%
	> 50 tahun	40,00%
	> 40 tahun	20,00%
	> 30 tahun	20,00%
	> 20 tahun	10,00%
Komposisi karyawan menurut gender	Pria	40,00%
	Wanita	60,00%
Komposisi karyawan menurut status ketenagakerjaan	Tetap	90,00%
	Kontrak	10,00%

3.4. Kegiatan Usaha dan Produk/Jasa Pembiayaan

Perusahaan merupakan perusahaan pembiayaan yang berizin dan diawasi oleh OJK. Dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, Perusahaan menawarkan produk/jasa pembiayaan sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Tipe dan skema pembiayaan yang dilaksanakan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Tipe Pembiayaan	Skema
Pembiayaan Investasi	Sewa Pembiayaan
	Jual dan Sewa-balik
	Anjak piutang dengan pemberian jaminan Penjual piutang
	Anjak piutang tanpa pemberian jaminan Penjual piutang
	Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran
	Pembiayaan proyek
	Pembiayaan Infrastruktur
	Pembiayaan lainnya yang disetujui OJK
Pembiayaan Modal Kerja	Jual dan Sewa-balik
	Anjak piutang dengan pemberian jaminan Penjual piutang
	Anjak piutang tanpa pemberian jaminan Penjual piutang
	Fasilitas modal usaha
	Pembiayaan lainnya yang disetujui OJK
Pembiayaan Multiguna	Sewa Pembiayaan
	Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran
	Fasilitas dana
	Pembiayaan lainnya yang disetujui OJK

3.5. Keanggotaan dalam Asosiasi dan Lembaga

Dalam rangka mendukung kegiatan usaha pembiayaan, Perusahaan telah bergabung dalam Asosiasi dan Lembaga sebagai berikut:

Nama Asosiasi/Lembaga	Keterangan
 Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia	- Bergabung sejak tahun 1986 - Posisi sebagai Anggota
 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	- Bergabung sejak tahun 2017 - Posisi sebagai Anggota
 Rapindo Asset Registry	- Bergabung sejak tahun 2023 - Posisi sebagai Anggota

4. Penjelasan Direksi

4.1. Kebijakan untuk merespon tantangan pemenuhan strategi keberlanjutan

Setelah pandemi Covid-19 mereda, pemulihan ekonomi nasional semakin gencar dilakukan. Hal ini ditandai dengan mulai tumbuhnya beberapa sektor ekonomi yang turun selama masa pandemi.

Namun demikian, pemulihan ekonomi ini masih terkendala dengan berlanjutnya dinamika geopolitik global yang terjadi di berbagai kawasan seperti perang di Eropa Timur antara Ukraina dan Rusia, menghangatnya hubungan RRC dan Amerika Serikat terkait Taiwan, konflik Palestina dan Israel dan lainnya. Selain konflik-konflik ini, perang dagang antara Amerika Serikat dan RRC juga turut mempengaruhi kondisi ekonomi dan perdagangan global. Banyak negara, termasuk negara ekonomi maju mengalami kenaikan tingkat inflasi yang memaksa mereka untuk menerapkan kebijakan pengetatan ekonomi melalui kebijakan suku bunga tinggi. Kebijakan ini akan mempengaruhi ekonomi nasional. Namun, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan antisipatif untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 masih cukup stabil yaitu mencapai sebesar 5,04% (*yoy*) atau sedikit lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 5,31%.

Menimbang perkembangan tersebut diatas, maka Perusahaan menyusun dan menetapkan fokus dalam menyalurkan pembiayaan untuk keperluan produktif. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan secara berkelanjutan maka Perusahaan harus dapat menjaga kualitas piutang pembiayaan dalam kondisi yang sehat sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal.

RAKB tahun 2023 merupakan tahap lanjutan dalam proses persiapan penerapan keuangan berkelanjutan. Penguatan kapasitas internal masih menjadi fokus Perusahaan agar dapat tumbuh secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan POJK no. 51/POJK.03/2017 yang menyampaikan 3 (tiga) prioritas utama yaitu (1) Pengembangan kemampuan internal dan Sumber Daya Manusia (“SDM”); (2) Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau regulasi internal; dan (3) Pengembangan produk/jasa pembiayaan yang terkait keuangan berkelanjutan.

Dalam hal penguatan kapasitas internal, sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah melakukan beberapa langkah penting dalam hal pengembangan sistem Teknologi Informasi (“TI”), penguatan organisasi, evaluasi dan pengkinian regulasi internal serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.

Dalam hal pengembangan sistem TI, Perusahaan telah melakukan pengembangan sistem TI secara mandiri untuk kebutuhan operasional dan juga telah berhasil mengimplementasikan sistem TI tersebut pada kegiatan operasional. Selain itu, Perusahaan juga telah berhasil melakukan memperbaharui dan mengimplementasikan sistem akuntansi. Proses integrasi antar sistem tersebut juga telah berhasil dilakukan.

Sejalan dengan implementasi sistem TI tersebut, Perusahaan juga telah melakukan evaluasi dan pengkinian regulasi internal untuk mendukung pertumbuhan kegiatan usaha pembiayaan.

Perusahaan juga tetap melanjutkan komitmen untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM dalam penerapan keuangan berkelanjutan dengan mengalokasikan sumber daya untuk mengikuti berbagai pelatihan/training dan seminar/webinar yang dibutuhkan.

Dengan tahapan strategis yang telah dilakukan ini, diharapkan kesadaran (*awareness*), pemahaman dan kompetensi SDM serta kesiapan infrastruktur organisasi dapat meningkat sehingga penerapan keuangan berkelanjutan dapat dilaksanakan secara optimal.

4.2. Penerapan keuangan berkelanjutan

Dalam melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan, Perusahaan telah menetapkan fokus dalam menyalurkan pembiayaan baru untuk keperluan produktif pada sektor ekonomi yang telah dilayani dan dipahami dengan baik. Melalui penerapan strategi tersebut, maka pencapaian Perusahaan pada kinerja aspek ekonomi dapat dilihat dari realisasi total aset tahun 2023 sebesar Rp. 111.408 juta atau mencapai 101,89% dibanding realisasi tahun 2022. Sedangkan realisasi piutang pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp. 49.053 juta atau mencapai 86,70% dibanding realisasi tahun 2022. Melalui realisasi piutang pembiayaan ini, maka realisasi total pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 7.268 juta atau mencapai 130,41% dibanding realisasi tahun 2022. Dan akhirnya, realisasi laba bersih komprehensif tahun 2023 sebesar Rp. 2.154 juta atau mencapai 205,91% dibanding realisasi laba komprehensif tahun 2022.

Portfolio piutang pembiayaan yang sesuai dengan kriteria keuangan berkelanjutan per Desember 2023 berdasarkan Taksonomi Hijau Indonesia (“THI”) edisi 1.0 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	NDC Sector	Piutang Pembiayaan (Dalam Rp. Juta)			
		Kategori Hijau	Kategori Kuning	Kategori Merah	Total
1	Energi	-	-	-	-
2	Kehutanan	-	-	-	-
3	Pertanian	-	-	-	-
4	Limbah	-	-	-	-
5	Proses Industri dan Penggunaan Produk	-	42.850	-	42.850
6	Lainnya	20	2.308	3.874	6.203
Grand Total		20	45.159	3.874	49.053

NDC: National Determined Contribution

Pencapaian kinerja aspek sosial pada tahun 2023 menunjukkan posisi yang stabil dalam hal komposisi SDM. Berdasarkan pendidikan masih didominasi dengan kenaikan pada tingkat pendidikan Strata 1 (“S1”). Sedangkan realisasi jumlah pelatihan/training dan atau seminar/webinar yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 sebanyak 17 sesi atau meningkat 141,67% dibanding realisasi tahun 2022. Seluruh sesi seminar/ webinar yang telah diikuti ini dilakukan secara *online* sedangkan beberapa pelatihan/training telah dilakukan secara *offline*.

Kegiatan literasi keuangan merupakan bagian dari partisipasi Perusahaan dalam pemberdayaan dan literasi keuangan kepada masyarakat. Realisasi kegiatan literasi keuangan pada tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dengan tema “Menjadi Konsumen yang Cerdas dalam Memanfaatkan Fasilitas Dana Pembiayaan”. Kegiatan literasi keuangan bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan Perusahaan Pembiayaan sebagai solusi untuk kebutuhan dana pembiayaan dalam strategi pengelolaan keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan secara *offline* dan melibatkan ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (“PKK”) di Rukun Warga (“RW”) 06 Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Jumlah partisipan yang hadir mengikuti kegiatan sebanyak 35 orang. Kegiatan tersebut berjalan lancar dan mendapatkan atensi yang positif dari warga. Agar kegiatan tersebut lebih menarik, Perusahaan juga bekerjasama dengan *brand* kosmetika terkemuka yang memberikan *beauty class* bagi ibu-ibu PKK tersebut.

Dalam pencapaian kinerja aspek lingkungan hidup, Perusahaan masih menggunakan pengukuran berupa realisasi konsumsi energi listrik dan pemakaian kertas dalam aktivitas operasional.

Jumlah pemakaian energi listrik sepanjang tahun 2023 sebesar 6.764 *Kilowatt/Hour* (“KwH”) atau mencapai 82,98% dibanding realisasi tahun 2022. Selanjutnya, Perusahaan secara mandiri melakukan pengukuran estimasi emisi

GRK yang dihasilkan dari pemakaian energi listrik tersebut dengan menggunakan referensi dari Pedoman Teknis Perhitungan *Baseline* Emisi GRK Sektor Berbasis Energi yang dikeluarkan Badan Perencana Pembangunan Nasional (“Bappenas”) tahun 2014. Melalui standarisasi tersebut, estimasi emisi GRK yang dihasilkan sepanjang tahun 2023 sebesar 4.904 kgCO₂/KwH atau mencapai 82,98% dibanding estimasi emisi GRK yang dihasilkan tahun 2022. Estimasi emisi yang dihasilkan tahun 2023 lebih rendah dibanding tahun 2022 karena upaya Perusahaan dalam melakukan penghematan penggunaan energi listrik. Meski estimasi emisi GRK yang dihasilkan tersebut relatif masih kecil, namun Perusahaan tetap memberikan komitmen untuk berkontribusi dalam menurunkan emisi GRK yang juga merupakan target *Paris Agreement* dengan melanjutkan pola kerja yang hemat energi listrik dan proses bisnis yang lebih efisien dan efektif.

4.3. Strategi pencapaian target

Dinamika geopolitik global makin mengkhawatirkan bukan hanya potensi melebarnya eskalasi konflik yang makin meluas, tapi juga dampak terhadap ekonomi dan perdagangan global yang pada akhirnya akan mempengaruhi perekonomian nasional. Tahun 2024 juga merupakan tahun politik dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang juga akan memanaskan suhu politik domestik.

Menimbang kondisi tersebut, Perusahaan menyusun dan menetapkan rencana kegiatan usaha pembiayaan yang disesuaikan dengan kapasitas dan kompetensinya agar tetap dapat menjaga kualitas piutang pembiayaan dalam kondisi yang sehat. Oleh karena itu, Perusahaan akan fokus pada pasar korporasi dan menyalurkan pembiayaan baru untuk keperluan produktif pada beberapa sektor ekonomi potensial yang sudah dijalankan dan dipahami dengan baik. Perusahaan secara bertahap juga mulai menyalurkan pembiayaan untuk keperluan non-produktif pada pasar perorangan.

Melanjutkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang sudah dijalankan, Perusahaan juga tetap melakukan pengembangan sistem informasi secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Proses pengkinian regulasi internal dilakukan secara paralel dan disesuaikan dengan pengembangan sistem informasi.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM masih menjadi prioritas. Perusahaan tetap berkomitmen untuk memberikan pelatihan/training yang sesuai kebutuhan dari Lembaga/Institusi yang mempunyai kompetensi.

Untuk efisiensi penggunaan energi listrik, Perusahaan akan dilanjutkan pola kerja hemat energi listrik sebagai upaya dalam rangka penurunan emisi GRK dari kegiatan usaha yang dilakukan.

5. Tata Kelola Berkelanjutan

5.1. Tugas dan tanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan

Penerapan tata kelola berkelanjutan berdasarkan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan. Dan Perusahaan telah menyusun dan menetapkan struktur tata kelola berkelanjutan yang mencakup Dewan Komisaris, Direksi dan masing-masing Satuan Kerja. Infrastruktur tata kelola berkelanjutan adalah regulasi internal, sistem informasi dan fungsi/tugas pokok masing-masing Satuan Kerja dalam struktur organisasi.

Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola berkelanjutan yang menjalankan fungsi pengawasan dan sebagai penasihat yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha pembiayaan yang dilaksanakan Direksi telah sesuai dengan tujuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi adalah organ tata kelola berkelanjutan yang menjalankan fungsi representasi dan manajerial yang memegang peran utama dalam kegiatan operasional Perusahaan. Direksi bertanggung jawab untuk memastikan strategi dan inisiatif jangka pendek maupun jangka panjang dapat dijalankan dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Direksi didukung oleh Satuan Kerja yang bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan penerapan keuangan berkelanjutan, Perusahaan telah menyusun dan menetapkan RAKB tahun 2020-2024. Fungsi dan peran supervisi atau pengawasan terhadap pelaksanaan RAKB tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi. Dan Direksi juga telah menetapkan dan menugaskan Satuan Kerja Pemasaran sebagai Satuan Kerja pelaksana keuangan berkelanjutan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) Menyusun RAKB;
- (2) Melaksanakan program penerapan RAKB;
- (3) Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja lainnya terkait pelaksanaan RAKB dan penyusunan Laporan Berkelanjutan;
- (4) Menyusun Laporan Keberlanjutan;
- (5) Bertanggung jawab kepada Direksi atas penerapan RAKB;

Tugas dan tanggung jawab fungsi Kepatuhan dalam tata kelola berkelanjutan adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Satuan Kerja lainnya

terkait penyusunan dan atau pengkinian regulasi internal seperti pedoman dan SOP termasuk juga koordinasi dan komunikasi dalam penyusunan Laporan Berkelanjutan. Fungsi Kepatuhan juga memberikan rekomendasi terkait aspek kepatuhan terhadap penerapan keuangan berkelanjutan.

Fungsi Internal Audit dalam tata kelola berkelanjutan juga tidak kalah pentingnya. Sebagai fungsi yang independen dalam organisasi, maka fungsi internal audit melakukan evaluasi dan penilaian mengenai kegiatan operasional terhadap prinsip penerapan Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan manajemen risiko melalui pendekatan yang sistematis sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dan juga sekaligus memperbaiki operasional Perusahaan.

5.2. Pengembangan kompetensi

Komitmen Perusahaan dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM sepanjang tahun 2023 telah dilakukan dengan mengikuti berbagai Seminar/Webinar yang dilaksanakan oleh OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (“APPI”) dan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang berkompeten dengan berbagai topik yang dapat mendukung penerapan keuangan berkelanjutan dengan perincian sebagai berikut:

Topik Utama	Jumlah partisipan karyawan (orang)
Economic Outlook 2024	1
Keuangan Berkelanjutan	5
Digitalisasi di Industri Multifinance	2
Era baru industri pembiayaan	2
Tantangan dalam Sektor Jasa keuangan	2
Ketahanan Nasional	1
Teknologi Informasi	1
Analisa Data dan Pelaporan	6
APU PPT & PPPSPM	5
Asset Registry	1
Pemanfaatan analisis big data	1
Total	27

5.3. Penjelasan manajemen risiko dalam penerapan keuangan berkelanjutan

Perusahaan melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan dengan menerapkan manajemen risiko berdasarkan POJK No. 44/POJK. 05/2020 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank meliputi penerapan 4 (Empat) pilar manajemen risiko yaitu:

- (1) Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

- (2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- (3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko;
- (4) Sistem pengendalian internal.

Perusahaan menyusun dan menetapkan struktur tata kelola dengan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan penugasan kepada Satuan Kerja Pemasaran sebagai pelaksana penerapan keuangan berkelanjutan. Selanjutnya dilakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas potensi risiko yang akan dihadapi dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Perusahaan telah menyelesaikan pengkinian regulasi internal seiring dengan implementasi sistem TI dan masih melanjutkan proses evaluasi atas regulasi internal tersebut untuk disesuaikan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.

Pada kegiatan penyaluran piutang pembiayaan, Perusahaan telah menetapkan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang memadai terhadap target sektor ekonomi yang menjadi target penyaluran pembiayaan. Proses bisnis yang diterapkan telah dilakukan segregasi/pembagian tugas yang memadai mulai dari proses inisiasi pembiayaan, keputusan pembiayaan dan pemantauan kualitas piutang pembiayaan.

Penerapan *1st Line of Defense* dalam sistem pengendalian internal pada masing-masing Satuan Kerja telah didukung dengan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai *2nd Line of Defense* yang menjadi mitra kerja bagi Satuan Kerja terkait dalam melakukan pemantauan risiko. Fungsi Internal Audit sebagai *3rd Line of Defense* juga telah berjalan untuk memastikan seluruh regulasi internal telah diterapkan dan dilaksanakan secara baik dan benar oleh seluruh pihak dalam internal Perusahaan dan juga sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan.

Terkait pengendalian *fraud* dan strategi *anti fraud*, Perusahaan mengacu pada POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, khususnya pada Bab XII mengenai pengendalian *fraud* dan strategi *anti fraud*. Dalam hal ini, Perusahaan telah membentuk Unit Kerja Anti Fraud (“UKAF”) sebagai salah satu upaya preventif aktif untuk mengendalikan/mengurangi potensi kejadian *fraud* dalam kegiatan operasional Perusahaan. Dan komitmen untuk memperkuat sistem pengendalian internal khususnya terkait pengendalian/pemantauan *fraud* telah dilakukan dengan menyusun dan menetapkan Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* dan Pengendalian *Fraud* (“P2SAF”) yang menjadi petunjuk pelaksanaan & tindakan

dalam pengendalian *fraud* melalui serangkaian proses kegiatan yang dikenal sebagai Catur Pilar Strategi Anti Fraud (“CPSAF”) yang mencakup kegiatan:

- (1) pencegahan;
- (2) pendeteksian;
- (3) investigasi /pelaporan & sanksi;
- (4) pemantauan /evaluasi & tindak lanjut.

Berdasarkan data dari UKAF, sepanjang tahun 2023 tidak terdapat kasus atau kejadian *fraud* yang terjadi dalam operasional Perusahaan dan tidak ada kasus atau kejadian *fraud* yang masih belum terselesaikan.

Komitmen penanganan pengaduan yang diterima dari Debitur telah dilaksanakan oleh Perusahaan melalui pembentukan Satuan Kerja Layanan Pengaduan Debitur (“LPD”) yang khusus menangani aduan dari Debitur. Pelaksanaan penanganan pengaduan debitur ini berdasarkan POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Satuan Kerja LPD mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan penyelesaian yang adil pengaduan yang disampaikan Debitur dan sekaligus juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak Debitur. Sebagai pedoman pelaksanaan LPD, Perusahaan telah menyusun mekanisme penerimaan, penanganan dan penyelesaian pengaduan Debitur.

Berdasarkan data dari Satuan Kerja LPD, sepanjang tahun 2023, Perusahaan belum menerima pengaduan dari Debitur dan tidak ada pengaduan Debitur yang belum terselesaikan.

5.4. Pendekatan pemangku kepentingan

Perusahaan telah melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, penentuan strategi dan penerapan keuangan berkelanjutan. Perusahaan juga melakukan pemetaan dan identifikasi keterlibatan pemangku kepentingan sebagai berikut:

Pemangku Kepentingan	Topik	Metode Pelibatan	Frekwensi Pendekatan	Respon Perusahaan
Calon debitur/ Debitur	Sosialisasi produk/jasa pembiayaan yang jelas dan transparan	Kantor Pusat, Telepon, <i>E-mail</i> dan <i>Website</i>	Jam operasional	Menyampaikan informasi produk/jasa pembiayaan
	Penjelasan mengenai produk/jasa pembiayaan yang diperoleh	<i>Face to face saat survey</i> , Perjanjian Pembiayaan dan <i>Welcoming Letter</i>	Proses survey dan saat persetujuan pembiayaan	Menyampaikan informasi detail mengenai produk/jasa pembiayaan yang diperoleh
	Kemudahan akses	Telepon, <i>E-mail</i> dan peran Satuan Kerja Pemasaran	Jam operasional	Menerima dan menindak lanjuti permintaan informasi dari Calon debitur/Debitur
	Layanan Pengaduan Debitur ("LPD")	Telepon dan <i>E-mail</i> PIC Satuan Kerja LPD	Jam operasional	Menerima dan menindak lanjuti permintaan informasi pengaduan dari Debitur
Pemegang Saham	Penyampaian informasi dan kinerja keuangan dan/atau non keuangan akhir tahun	Pelaporan Kinerja dan RUPS	Kuartal dan tahunan	Melaporkan kinerja keuangan dan non keuangan
	Kegiatan/aktivitas penting lainnya	Pelaporan kegiatan/aktivitas penting	Setiap ada kegiatan/aktivitas penting	Menyampaikan rencana dan laporan kegiatan/aktivitas penting
Regulator	Kepatuhan peraturan dan perundang-undangan	Penyampaian Rencana Bisnis Tahunan ("RBT") dan Laporan Realisasi Menyusun RAKB dan Laporan Berkelanjutan	RBT 1 tahun sekali & Laporan realisasi 2 kali setahun 1 tahun sekali	Menyusun RBT dan laporan-laporan yang diwajibkan Regulator sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
		Penyampaian laporan lainnya yang diwajibkan Regulator sesuai jadwal yang telah ditentukan	Sesuai jadwal yang ditetapkan Regulator	
Pemasok/ Mitra Kerja	Hubungan bisnis yang saling menguntungkan	Sosialisasi kebijakan mengenai hubungan dengan pemasok	Minimal 1 tahun sekali	Menyusun perjanjian kerjasama dengan pemasok/mitra kerja dalam penyediaan barang/jasa.
	Proses pengadaan barang/jasa yang adil dan transparan			
Karyawan	Pemenuhan hak karyawan Kesempatan pengembangan diri dan karir	Media Internal (<i>E-mail</i> , <i>Internal Memo</i> , <i>Internal Meeting</i>) dan Evaluasi Tahunan	Setiap ada informasi yang disampaikan kepada karyawan dan 1 tahun sekali untuk Evaluasi Tahunan	Sosialisasi kebijakan kepada karyawan
	Proses rekrutmen Pengalaman bekerja yang berharga			
Komunitas dan/atau Masyarakat	Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Pertemuan dengan komunitas dan/atau masyarakat	Minimal 1 tahun sekali	Memberikan literasi dan pengetahuan mengenai keuangan, produk/jasa Perusahaan dan berbagai info yang menarik dan produktif bagi masyarakat

5.5. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan

Dalam melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan sepanjang tahun 2022, Perusahaan belum menemukan permasalahan yang berpengaruh dalam proses bisnis. Pemahaman dan kesadaran (*awareness*) SDM mengalami peningkatan namun masih perlu terus dikembangkan sehingga memberikan dampak positif dalam penerapan keuangan berkelanjutan.

Tantangan yang masih harus diselesaikan adalah melakukan identifikasi sektor ekonomi dari Calon debitur/Debitur yang sesuai dengan kriteria keuangan berkelanjutan. OJK telah menyusun dan mengeluarkan Taksonomi Hijau Indonesia (“THI”) edisi 1.0 sebagai standarisasi definisi dan kriteria hijau sehingga standarisasi ini perlu dipelajari lebih lanjut untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan. Perusahaan juga telah melakukan klasifikasi sektor ekonomi berdasarkan THI tersebut, namun tetap perlu dikembangkan lebih jauh agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan regulasi. Keuangan berkelanjutan juga masih perlu dilakukan sosialisasi yang konsisten kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan kerjasama dari masyarakat dan Debitur/Calon debitur.

6. Kinerja berkelanjutan

6.1. Membangun budaya berkelanjutan

Dalam rangka melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan secara konsisten, Perusahaan menyadari pentingnya budaya keberlanjutan. Untuk membangun budaya keberlanjutan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah yang terarah dan konsisten. Struktur tata kelola perusahaan yang baik dan kompetensi SDM yang memadai merupakan kebutuhan penting dalam membangun budaya keberlanjutan. Oleh karena itu, Perusahaan secara terus menerus melakukan upaya perbaikan tata kelola perusahaan yang baik dan juga meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM. Selain itu, perlu juga terus dikembangkan kepedulian dan kesadaran (*awareness*) SDM terhadap keuangan berkelanjutan agar dapat terbangun budaya keberlanjutan yang baik.

Sebagai Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, kegiatan operasional yang dilakukan tidak seperti perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksi. Dalam pelaksanaan operasional, Perusahaan menggunakan energi listrik dan Perusahaan memahami bahwa energi listrik yang digunakan saat ini masih menggunakan bahan bakar fosil. Oleh karena itu, Perusahaan menyadari bahwa pola kerja hemat energi listrik akan memberikan dampak pada penurunan emisi GRK. Pola kerja hemat energi listrik dapat dilakukan semua pihak dalam internal Perusahaan dan juga merupakan kontribusi dan andil Perusahaan dalam penurunan emisi GRK.

6.2. Kinerja aspek ekonomi

Pandemi *Covid-19* dan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat telah berakhir pada tahun 2023, namun demikian berlangsungnya dinamika geopolitik dan perang di beberapa kawasan rawan konflik mengakibatkan pemburukan ekonomi dan perdagangan global. Hal ini pasti akan mempengaruhi perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah antisipatif untuk mengatasi gejolak ekonomi global dan menjaga perekonomian nasional tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 berdasarkan data BPS mencapai 5,04% (*yoy*). Walaupun capaian pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan penurunan dibanding capaian tahun 2022, namun diyakini masih dalam kondisi stabil mengingat dampak gejolak ekonomi global yang terjadi terhadap kondisi ekonomi yang dialami oleh banyak negara.

Berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan dari OJK tahun 2023, realisasi total aset sebesar Rp. 552.886.981 atau mencapai 113,32% dibanding realisasi tahun 2022. Sedangkan realisasi piutang pembiayaan industri pembiayaan sebesar

Rp.470.863.486 juta atau mencapai 113,23% terhadap realisasi tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan industri pembiayaan masih dapat bertumbuh dalam kondisi perekonomian yang cukup sulit, namun pelaku industri pembiayaan masih harus terus mewaspadaikan dinamika geopolitik global yang masih terus berlanjut pada tahun 2024.

Sejalan dengan strategi yang dijalankan, selama tahun 2023 Perusahaan telah menyalurkan piutang pembiayaan baru pada sektor ekonomi yang mempunyai telah dipahami dan dilayani dengan baik. Sampai akhir Desember 2023, Perusahaan membukukan realisasi total aset sebesar Rp. 111.408 juta atau mencapai 101,89% terhadap realisasi tahun 2022. Sedangkan realisasi piutang pembiayaan sebesar Rp. 49.053 juta atau mencapai 86,70% terhadap realisasi tahun 2022. Melalui kegiatan usaha pembiayaan tahun 2023, Perusahaan membukukan realisasi total pendapatan sebesar Rp. 7.268 juta atau mencapai 130,41% terhadap realisasi tahun 2022. Dan akhirnya, realisasi laba komprehensif tahun 2023 Rp. 2.154 juta atau mencapai 205,91% terhadap realisasi laba komprehensif tahun 2022. Adapun perbandingan pencapaian beberapa indikator keuangan dan rasio-rasio penting adalah sebagai berikut:

Deskripsi (Dalam Rp. Juta)	2023	2022	2021
Total aset	111.408	109.341	108.539
Piutang pembiayaan	49.053	56.576	56.907
Total pendapatan	7.268	5.573	5.363
Laba komprehensif tahun berjalan neto	2.154	1.046	957
Rasio-2 penting: (Dalam %)			
Return on Asset ("ROA")	1,97	0,88	0,90
Return on Equity ("ROE")	1,98	0,92	0,95
Non Performing Financing ("NPF")	-	-	-
Rasio permodalan	441,96	375,81	370,48
Current Ratio	80.622,31	16.705,82	18.052,50

Berdasarkan THI edisi 1.0, piutang pembiayaan yang sedang berjalan dan berstatus aktif sampai akhir tahun 2023 kategori piutang pembiayaan yang sesuai keuangan berkelanjutan adalah kategori hijau sebesar 0,04%; kategori kuning sebesar 92,06%; dan kategori merah sebesar 7,90%.

6.3. Kinerja aspek sosial

Sebagai komitmen terhadap penerapan keuangan berkelanjutan, Perusahaan mempunyai kewajiban menyediakan dan menawarkan produk/jasa pembiayaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan produk/jasa pembiayaan yang setara kepada seluruh Debitur/Calon debitur dan masyarakat. Kesetaraan Layanan tersebut

diwujudkan dengan memberikan informasi secara memadai mengenai produk/jasa pembiayaan, fitur atau program kepada Debitur/calon debitur melalui media-media yang terjangkau bagi Debitur/Calon debitur dan masyarakat antara lain *Website, E-mail*, brosur, atau media lainnya yang dapat diakses masyarakat.

6.3.1. Ketenagakerjaan

Karyawan merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memegang peranan penting dalam kegiatan operasional Perusahaan sehingga diperlukan hubungan kerja yang baik. Untuk itu, Perusahaan selalu mengacu dan berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satu implementasi bentuk kepatuhan yang dilakukan Perusahaan adalah tidak merekrut pekerja anak dan juga memberlakukan jam kerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal kesempatan kerja dan pengembangan diri, Perusahaan memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada siapapun yang memiliki kompetensi yang sesuai dan integritas yang tinggi, menjunjung etos kerja yang tinggi dan kejujuran.

Perusahaan memastikan semua hak karyawan telah dipenuhi secara memadai dengan memberikan remunerasi berdasarkan kebijakan perusahaan dan kinerja karyawan. Seluruh karyawan telah menerima remunerasi yang sesuai dengan ketentuan upah minimum regional.

Perusahaan secara terus menerus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi karyawan agar dapat mencapai prestasi dan kinerja terbaik melalui pelatihan/training dan atau seminar/webinar yang dilaksanakan oleh OJK, Regulator, APPI maupun lembaga-lembaga pendidikan terkemuka yang mempunyai kompetensi baik. Seluruh karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensinya dengan mempertimbangkan kebutuhan Perusahaan.

6.3.2. Masyarakat

Perusahaan memiliki 1 (satu) kantor pusat yang merangkap kantor operasional di Jakarta dengan cakupan area operasional di area Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Timur. Kegiatan usaha dan pelayanan Debitur/Calon debitur masih dapat dilaksanakan melalui jaringan kantor yang tersedia dan Perusahaan belum memiliki rencana untuk membuka Kantor Selain Kantor Cabang (“KSKC”).

Perusahaan terus berkomitmen berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Pada tahun 2023, kegiatan ini dilaksanakan secara *offline* atau tatap muka secara langsung dengan partisipan yang terdiri dari ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (“PKK”) RW 06 kelurahan Pakulonan Barat Kota Tangerang Selatan. Tema literasi keuangan yang disampaikan adalah “Menjadi Konsumen yang Cerdas dan Bijak Dalam Memanfaatkan Fasilitas Dana Pembiayaan”. Partisipan yang hadir sebanyak 35 orang yang sebagian besar terdiri ibu-ibu dan wanita muda yang mempunyai minat atas pengelolaan keuangan keluarga. Kegiatan ini berlangsung meriah dan mendapat respon yang positif partisipan karena mendapatkan wawasan baru mengenai industri keuangan khususnya perusahaan pembiayaan. Kegiatan ini juga berlangsung secara menarik karena dimeriahkan dengan kegiatan demo merias wajah (*Beauty Class*) dari brand kosmetika terkemuka di Indonesia.

Terkait pengaduan dari masyarakat mengenai aspek sosial dan lingkungan hidup, Perusahaan belum menyediakan mekanisme dan media khusus. Namun demikian, sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawab kepada masyarakat, Perusahaan menyediakan media untuk menyalurkan pengaduan melalui saluran sebagai berikut:

Telepon	(021)29667879
E-mail	tufjkt@thetempogroup.com

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Perusahaan bersedia menerima saran ataupun pengaduan dari Debitur/Calon debitur. Dan untuk menangani pengaduan tersebut, Perusahaan telah menyusun dan menetapkan pedoman dan mekanisme penanganan pengaduan Debitur yang dituangkan dalam SOP Layanan Pengaduan Debitur. Sampai akhir tahun 2023, tidak ada pengaduan dari Calon debitur/Debitur yang diterima dan juga tidak ada pengaduan Calon debitur/Debitur yang belum diselesaikan.

6.4. Kinerja aspek lingkungan hidup

Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa kegiatan operasional yang dilakukan Perusahaan bukan merupakan kegiatan yang secara langsung membahayakan ataupun berpotensi merusak lingkungan hidup. Namun demikian, Perusahaan tetap memberikan komitmen untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan operasional sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Dalam kegiatan operasionalnya, Perusahaan mengkonsumsi energi listrik dan menggunakan kertas. Energi listrik yang dikonsumsi tersebut masih berasal pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil sehingga Perusahaan terus berupaya menjalankan kegiatan operasional yang ramah terhadap

lingkungan hidup melalui pola kerja hemat energi listrik. Terkait penggunaan yang kertas terbuat dari bahan baku yang disebut *pulp* berasal dari serat tanaman yang diolah sedemikian rupa sehingga membentuk suatu lembaran kertas. Penggunaan kertas yang berlebihan berpotensi merusak lingkungan hidup dengan penebangan pohon yang berlebihan. Oleh karena itu, Perusahaan juga berupaya melakukan penghematan dalam menggunakan kertas sehingga berperan mengurangi penebangan hutan, menyelamatkan tanaman, dan mengurangi polusi udara.

Penggunaan energi listrik paling banyak dalam kegiatan operasional Perusahaan adalah perangkat penerangan ruangan dan peralatan elektronik yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada Calon debitur/Debitur. Pola kerja yang hemat energi listrik ini sudah dilakukan sejak tahun 2020 dan masih akan terus dilakukan dalam tahun mendatang. Sepanjang tahun 2023, realisasi jumlah energi listrik yang dikonsumsi Perusahaan berdasarkan data tagihan Perusahaan Listrik negara (“PLN”) sebesar 6.764 Kwh atau mencapai 82,98% dibanding realisasi tahun 2022. Sebagai perbandingan, berikut ini realisasi jumlah energi listrik yang dikonsumsi dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

	2023	2022	2021
Realisasi konsumsi energi listrik (Kwh)	6.764	8.151	7.280

Perusahaan secara mandiri melakukan perhitungan estimasi emisi GRK yang dihasilkan dari kegiatan usahanya dengan menggunakan referensi Pedoman Teknis Perhitungan *Baseline* Emisi GRK Sektor Berbasis Energi yang dikeluarkan Bappenas tahun 2014. Berdasarkan data konsumsi energi listrik diatas, maka Perusahaan menghitung estimasi emisi GRK yang dihasilkan dari kegiatan usaha pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	2023	2022	2021
Estimasi emisi GRK yang dihasilkan (KgCO2)	4.904	5.910	5.278

Sedangkan realisasi penggunaan kertas pada kegiatan usaha Perusahaan tahun 2023 sebanyak 63.404 lembar kertas atau mencapai 111,45% dibanding penggunaan kertas tahun 2022. Seluruh penggunaan kertas ini digunakan dalam kegiatan usaha dan pelayanan kepada Calon debitur/Debitur sehingga meningkatnya kegiatan usaha akan berdampak pada kenaikan pemakaian kertas. Perusahaan akan terus mengupayakan pola dan sistem kerja yang dapat mengurangi penggunaan kertas.

7. Referensi Lampiran II POJK No.51/POJK.03/2017

No	Pengungkapan	Halaman
1	Penjelasan Strategi berkelanjutan	1
2	Ikhtisar Kinerja Berkelanjutan	
	a. Aspek Ekonomi	3
	b. Aspek Sosial	3
	c. Aspek Lingkungan hidup	3
3	Profil singkat Perusahaan	
	a. Visi Misi keberlanjutan	4
	b. Nama, Alamat, Nomer telepon, Alamat surat elektronik (<i>E-mail</i>) dan <i>Webside</i> Perusahaan	5
	c. Skala usaha Perusahaan	5
	d. Penjelasan singkat produk/jasa pembiayaan	5
	e. Keanggotaan dalam Badan/Asosiasi	6
4	Penjelasan Direksi	
	a. Kebijakan untuk merespon tantangan pemenuhan strategi keberlanjutan	7
	b. Penerapan keuangan berkelanjutan	8
	c. Strategi pencapaian target	10
5	Tata kelola berkelanjutan	
	a. Uraian mengenai tugas bagi Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan	11
	b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan	12
	c. Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris	12
	d. Penjelasan mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dan pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan	15
	e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan	16
6	Kinerja berkelanjutan	
	a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya berkelanjutan di internal Perusahaan	17
	b. Uraian mengenai kinerja ekonomi 3 (tiga) tahun terakhir	17
	c. Kinerja sosial 3 (tiga) tahun terakhir	18
	d. Kinerja lingkungan hidup bagi Perusahaan	20